

PENDIDIKAN POLITIK BAGI MASYARAKAT OLEH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DI KABUPATEN PANDEGLANG PROVINSI BANTEN

Fernius Radjani Sinaga
NPP. 30.0612
Asdaf Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten
Program Studi Politik Indonesia Terapan
Email: ferniusradjanisinaga@mail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Dolf Edward Mitte Boga, MM.

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Political education is an important part of educating the nation's life. Political education is the right way to form a high-minded society, especially in the field of politics. Political education itself is the duty and responsibility of the National and Political Unity Agency of Pandeglang Regency to provide knowledge to the public about politics. Pandeglang people tend to have low political insight, this can be seen from the rampant money politics that occurs in the general election agenda or others. Pandeglang people also still fall into the passive group characterized by people who do not know who the political actors and parties are. **Purpose:** The objectives of this research are 1) Knowing and analyzing the political education of the community in Pandeglang Regency 2) Knowing and analyzing the obstacles faced by the National and Political Unity Agency, in providing political education in Pandeglang Regency 3) Knowing and analyzing the efforts of the National and Political Unity Agency in overcoming obstacles to providing political education in Pandeglang Regency. **Method:** In this study the authors used qualitative research methods with data collection using interview and documentation techniques and the analysis techniques used were data reduction, data presentation, data triangulation, and conclusion drawing. **Result:** The results of this study indicate that a) Political education carried out runs continuously using direct face-to-face methods and the intended target is the community. b) The process of political education is often hampered internally and externally. The internal problem is the lack of professional and competent employees. The external problem is the infrastructure of Pandeglang Regency which is not good and evenly distributed plus the size of Pandeglang Regency. c) The efforts made by the National Unity and Political Agency of Pandeglang Regency in overcoming obstacles are by cooperating with other agencies such as the General Election Commission, Non-Governmental Organizations, Mass Organizations, or Community Leaders. In addition, this agency also implements political education indirectly by using print media. **Conclusion:** political education in pandeglang district runs well and continues. as for the obstacles that occur in the implementation of political education both internally and externally can be resolved by cooperating with other agencies such as the KPU, also by implementing online political education to reach a wider community.

Keywords: National and Political Unity Agency, Political Education

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pendidikan politik merupakan bagian yang penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan politik adalah cara yang tepat untuk membentuk masyarakat yang berwawasan tinggi terkhusus pada bidang politik. Pendidikan

politik sendiri merupakan tugas dan tanggung jawab dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Pandeglang untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai politik. Masyarakat Pandeglang cenderung memiliki wawasan politik yang rendah, ini dapat dari masih maraknya money politic yang terjadi dalam agenda pemilihan umum ataupun lainnya. Masyarakat Pandeglang juga masih masuk ke dalam golongan kelompok pasif ditandai dengan masyarakat yang tidak mengenal siapa aktor politik dan partainya. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini adalah 1) Mengetahui dan menganalisa pendidikan politik masyarakat di Kabupaten Pandeglang 2) Mengetahui dan menganalisa hambatan yang dihadapi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dalam memberikan pendidikan politik di Kabupaten Pandeglang 3) Mengetahui dan menganalisa upaya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mengatasi hambatan untuk memberikan pendidikan politik di Kabupaten Pandeglang. **Metode:** Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi serta teknik analisis yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, triangulasi data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa a) Pendidikan politik yang dilakukan berjalan secara berkesinambungan menggunakan metode tatap muka langsung dan sasaran yang dituju adalah masyarakat. b) Proses pendidikan politik sering kali hambatan yaitu secara internal dan eksternal. Permasalahan internal ialah kurangnya pegawai profesional dan berkompeten. Permasalahan eksternal yaitu infrastruktur Kabupaten Pandeglang yang belum baik dan merata ditambah luasnya Kabupaten Pandeglang. c) Upaya yang dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pandeglang dalam mengatasi hambatan adalah dengan bekerja sama dengan instansi lainnya seperti Komisi Pemilihan Umum, Lembaga Swadaya Masyarakat, Ormas, atau Tokoh Masyarakat. Selain itu badan ini juga melaksanakan pendidikan politik secara tak langsung dengan menggunakan media cetak. **Kesimpulan:** pendidikan politik yang ada di kabupaten pandeglang berjalan dengan baik dan berlanjut. adapun hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pendidikan politik baik secara internal dan eksternal dapat diselesaikan dengan cara bekerja sama dengan instansi lain seperti KPU, juga dengan menerapkan pendidikan politik secara online untuk menjangkau masyarakat lebih luas. **Kata kunci:** Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Pendidikan Politik

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pendidikan merupakan istilah bagi suatu bentuk usaha yang dilakukan atau dilaksanakan dengan maksud mengubah sifat dan tabiat seseorang baik dalam keadaan sadar maupun tidak. Adapun definisi dari ilmu politik adalah ilmu yang menelaah mengenai suatu kehidupan di lingkup masyarakat hal tersebut menyangkut akan sebuah kekuasaan. Secara ringkasnya politik merupakan rupa dari segala kegiatan yang berkenaan dengan kekuasaan dalam proses pemerintahan, juga bentuk dari organisasinya dan hal yang berkenaan dengan tujuan tersebut. Pendidikan politik merupakan upaya untuk memberikan pemahaman atau pengetahuan dalam mengelola sistem pemerintahan yang sehat dalam berkuasa. Adanya pendidikan politik ini memiliki nilai positif dalam lingkup sosial masyarakat sehingga dapat melatih peserta didik sebagai anggota masyarakat yang ideal serta mampu berpartisipasi dalam dunia politik. Pendidikan politik juga dapat menanamkan nilai-nilai politik yang ideal untuk siswa. Dengan cara demikian maka peserta didik dapat menjadi masyarakat benar-benar memahami akan dunia perpolitikan yang mampu melakukannya dengan baik sehingga pelaksanaan politik untuk kepentingan bangsa Indonesia tidak salah dalam penggunaan kekuasaan. Sebagai sebuah negara demokrasi, Membangun partisipasi dan pengetahuan warga negara diperlukan dalam demokrasi. Hanya partisipasi aktif dari masyarakat yang akan membuat demokrasi berfungsi. Menyadari betapa pentingnya bagi suatu bangsa untuk meningkatkan

literasi dan pemahaman politik. Kemudian Bashori (2018:292) percaya bahwa komponen kunci untuk memperkuat demokrasi adalah literasi politik. Sikap apatis terhadap proses demokrasi dan dinamika politik pemerintahan yang melingkupinya sering kali disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang isu-isu politik dan kegiatan politik. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pandeglang memiliki peran dalam mengedukasi masyarakat tentang politik. Kedudukan, organisasi, tugas, dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pandeglang diatur dalam Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 122 Tahun 2021.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Rendahnya literasi politik yaitu ketika pemilihan umum dilaksanakan, terlihat jelas bahwa masyarakat memiliki pemahaman politik yang kurang baik karena banyak pemilih yang masih hanya mendukung calon kepala daerah atau calon partai berdasarkan seberapa besar dukungan yang mereka terima dalam bentuk uang atau makanan. Menurut Ismawan (1999:5) hal ini mengindikasikan bahwa keterlibatan politik transaksional dan politik praktis digunakan dalam partisipasi politik masyarakat. Sebagai contoh pada pemilu tahun 2019 ditemui dugaan money politic yang dilakukan oleh salah satu calon legislatif DPR RI Dapil Banten 1 dari partai NasDem, yang memberikan uang sebesar 20 ribu rupiah kepada masyarakat di Kecamatan Sobang, akan tetapi koordinator divisi penindakan pelanggaran Bawaslu Pandeglang, Fauzi Ilham mengatakan kasus tersebut tidak memenuhi unsur pidana (bantenhits.com, 2019). Selanjutnya Caleg DPR dari Dapil 1 Banten Usep Saepudin datang ke Bawaslu dan bercerita mengaku kalah akibat politik uang. Usep meminta Bawaslu membuat tim Investigasi karena maraknya pembagian uang di Lebak-Pandeglang (newsdetik.com, 2019).

Hasil penelitian KPU pada tahun 2020 mendapatkan kesimpulan bahwa Pemilih di Kabupaten Pandeglang sebagian besar masuk ke dalam kelompok pasif, kelompok ini tidak sepenuhnya mengenal partai atau kandidat (pasangan calon) yang mereka pilih maupun yang berkompetisi dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, mereka hanya tahu identitas dan nama kandidatnya saja terlebih kepada petahana yang ikut kembali mencalonkan diri pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang tahun 2020 ini (KPU, 2021:134). Banyaknya masyarakat Kabupaten Pandeglang yang tergabung ke dalam kelompok pasif disebabkan kurangnya pengetahuan juga pemahaman politik yang ada di masyarakat Pandeglang.

Isu lainnya adalah keterlibatan masyarakat dalam politik menunjukkan tanda-tanda kelesuan, yang dibuktikan dengan menurunnya kualitas dan kuantitas partisipasi politik. Misalnya, dalam pelaksanaan Pilkada Pandeglang tahun 2020. KPU RI memperkirakan akan mencapai target 77,5% untuk partisipasi pemilih pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau wali kota dan wakil wali kota yang akan diselenggarakan pada 9 Desember 2020. mara KPU Provinsi Banten menargetkan partisipasi pemilih sebesar 75% dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 904.782 pemilih, 520 pemilih yang pindah memilih (DPPH), dan 6.422 pemilih yang tidak terdaftar di DPT namun menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP-el atau surat keterangan (DPTb) (KPU, 2021:4).

Data di atas menggambarkan bahwa masyarakat Pandeglang tidak terlalu peduli dengan adanya Pilkada pada tahun 2020, bila dilihat dari partisipasi masyarakat yang mengikuti Pilkada 2020 tidak mencapai target yang diharapkan, hal ini disebabkan oleh kurangnya pendidikan politik yang diterima masyarakat yang seharusnya menjadi perangsang masyarakat untuk mengikuti dinamika politik.

3. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian peneliti terinspirasi dari beberapa penelitian terdahulu, yang mana konteks yang adalah mengenai pendidikan politik. Penelitian Alex Victor Wanma berjudul Pentingnya Pendidikan Politik Generasi Muda Terhadap Pelaksanaan Partisipasi Politik di Distrik Samofa

Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa upaya para agen untuk mendorong generasi muda berpartisipasi dalam politik tidak berhasil. Selain itu, implementasi keterlibatan politik belum secara signifikan dipengaruhi oleh pendidikan politik generasi muda (Wanma, 2013). Penelitian Surtia Bela Anggraeni yang berjudul Pendidikan politik dan political engagement: pengaruh pendidikan politik alumni ilmu politik Fisip UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Terhadap keterlibatannya dalam institusi politik memiliki hasil temuan menunjukkan bahwa tingkat pendidikan politik dan keterlibatan politik di kalangan lulusan Program Studi Ilmu Politik FISIP UIN Jakarta sama-sama sangat tinggi. Pendidikan politik memiliki hubungan dan pengaruh yang positif terhadap keterlibatan politik, dengan kekuatan hubungan sebesar 0,487 dan pengaruh sebesar 23,7%, berdasarkan uji korelasi (pengaruh) dan uji regresi (hubungan) (Anggraeni, 2022). Penelitian Azfina Julyara yang berjudul Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Pemberdayaan Nasionalisme Pemuda Kepulauan Riau dalam penelitian memiliki temuan menunjukkan bahwa Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau belum melaksanakan tanggung jawabnya di bidang pembinaan wawasan kebangsaan dengan semaksimal mungkin. Hal ini disebabkan oleh kurangnya program kerja yang dilaksanakan, rendahnya akses pemuda terhadap kegiatan yang diselenggarakan (Julyara, 2015).

4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Dalam penelitian yang berjudul Pentingnya Pendidikan Politik Generasi Muda Terhadap Pelaksanaan Partisipasi Politik Di Distrik Samofa yang dilakukan oleh Wanma ini memiliki persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu fokus dari penelitian sama-sama membahas pendidikan politik dan menggunakan metode penelitian yang sama yaitu metode kualitatif sedangkan perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan yang penulis kerjakan adalah perbedaan lokus penelitian dan teori yang digunakan (Alex Victor Wanma, 2013).

Dalam penelitian yang berjudul Pendidikan politik dan political engagement: pengaruh pendidikan politik alumni ilmu politik Fisip UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Terhadap keterlibatannya dalam institusi politik yang dilakukan Anggraeni memiliki kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu aspek yang dibahas adalah pendidikan politik sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian sebelumnya menggunakan metode penelitian kuantitatif, teori yang digunakan pun berbeda dengan teori yang penulis gunakan dan tempat penelitian dilaksanakan di tempat berbeda pula (Surtia Bela Anggraeni, 2022).

Dalam penelitian yang berjudul Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Pemberdayaan Nasionalisme Pemuda Kepulauan Riau yang dilakukan oleh Julyara memiliki kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif dan mengambil data pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adapun perbedaannya antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang penulis lakukan adalah fokus yang diutamakan dalam penelitian sebelumnya adalah pada pembangunan nasional sedangkan fokus yang penulis lakukan adalah pada pendidikan politik (Azfina Julyara, 2015)

5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui dan menganalisa pendidikan politik masyarakat di Kabupaten Pandeglang serta apa saja hambatan yang dihadapi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dalam memberikan pendidikan politik di Kabupaten Pandeglang dan apa upaya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dalam mengatasi hambatan untuk memberikan pendidikan politik di Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dikarenakan Menurut Bungin (2015:53), pendekatan penelitian kualitatif merupakan satu-satunya cara yang dapat diandalkan dan tepat untuk memahami fenomena sosial yang muncul (perilaku manusia), sehingga penulis menggunakan penelitian kualitatif dalam penelitian ini. Menurut Simangunsong (2017:190), berdasarkan metodologi penelitian yang digunakan oleh peneliti, penelitian kualitatif adalah penelitian partisipatif dengan desain penelitian yang fleksibel atau dapat dimodifikasi untuk mengakomodasi rencana dan kondisi yang ada, dapat dianggap sebagai jenis penelitian di lokasi penelitian yang sebenarnya. Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 5 orang informan yang terdiri dari 1 orang kepala Kepala bidang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pandeglang, divisi sosialisasi, partisipasi masyarakat, pendidikan pemilih dan SDM, dan masyarakat (dalam hal ini siswa SMA atau setingkat dan pemilih tetap yang terdaftar di DPT sebagai objek penelitian sebanyak 2 orang perkategori) Adapun analisisnya menggunakan teori Pendidikan politik yang digagas oleh Kartini Kartono (kartono, 1996) yang menyatakan pendidikan politik merupakan upaya pendidikan yang disengaja dan sistematis untuk membentuk individu agar mampu menjadi partisipan yang bertanggung jawab secara etis/moral dalam pencapaian tujuan politik dan membaginya dalam 3 dimensi yaitu tingkat pemahaman konsep politik, tingkat kesadaran politik, dan tingkat partisipasi politik.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan dalam penelitian ini akan didasarkan pada temuan penelitian dari studi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengenai pendidikan politik bagi masyarakat di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Temuan penulis dari penelitian tersebut meliputi data-data yang berupa dokumen dan wawancara dengan narasumber.

Penulis akan memfokuskan pembahasan pada bagaimana siasat yang digunakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan pendidikan politik di Kabupaten Pandeglang serta variabel-variabel yang mempengaruhi proses tersebut.

3.1.1 Pendidikan Politik Masyarakat di Kabupaten Pandeglang

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dituntut untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang politik sebagai bagian dari upaya pendidikan politik. Oleh karena itu, kegiatan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat pendidikan politik di Kabupaten Pandeglang, dan hal ini penulis analisis dengan menggunakan teori yang dimiliki oleh Kartini Kartono yang memberikan dimensi sebagai berikut

- a. Tingkat pemahaman konsep politik
- b. Tingkat kesadaran politik
- c. Tingkat partisipasi politik

Dari hasil penelitian indikator di atas akan menghasilkan data-data yang dapat diambil dan membentuk sebuah hasil yang dapat disimpulkan guna menjawab rumusan masalah pada penelitian yang penulis lakukan. Indikator di atas akan dikemas dalam bentuk pertanyaan/wawancara yang ditujukan kepada narasumber di lapangan. Data dari hasil wawancara tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pemahaman konsep politik

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dapat diambil suatu hasil bahwa pemahaman masyarakat Pandeglang masuk kedalam golongan pasif mereka hanya mereka hanya mengenal nama dari aktor politik dan tidak cukup paham akan apa itu politik.

b. Kesadaran Politik

Hasil menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat Pandeglang masih kurang baik, kurangnya kesadaran tersebut disebabkan oleh kurangnya informasi akan pentingnya politik dan bagaimana politik itu bekerja.

c. Partisipasi politik

Partisipasi masyarakat Pandeglang dalam melaksanakan kegiatan politik terkhusus pemilihan sudah cukup baik bila dilihat dari hasil pemilihan kepala daerah 2020, angka ini dinilai baik dibandingkan dengan partisipasi masyarakat pada tahun 2015, kenaikan angka ini bukan serta merta naik dengan sendirinya melainkan melalui pendidikan politik yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Pandeglang, akan tetapi peningkatan partisipasi ini tidak diiringi kesadaran dan wawasan masyarakat tentang politik. Hal ini dikhawatirkan masyarakat hanya asal memilih tanpa memilah aktor politik yang baik.

3.1.2. Hambatan yang Dihadapi Oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Memberikan Pendidikan Politik di Kabupaten Pandeglang

Dalam pelaksanaan pendidikan politik tidak serta merta dapat terlaksana dengan baik, ini disebabkan hambatan atau permasalahan yang ada dalam pelaksanaan proses pendidikan politik, dalam pelaksanaannya hambatan tersebut terbagi atas dua faktor yaitu eksternal dan internal, dalam faktor internal masalah yang dihadapi berasal dari dalam instansi yaitu kurangnya pegawai profesional yang bekerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pandeglang. Sedangkan dalam hambatan eksternal terjadi di luar dari pada instansi tersebut yaitu luasnya daerah Kabupaten Pandeglang serta kurang meratanya infrastruktur hingga menyulitkan Tim Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan pendidikan politik.

3.1.3 Upaya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Mengatasi Hambatan yang Dihadapi dalam Memberikan Pendidikan Politik di Kabupaten Pandeglang

Dalam pelaksanaan pendidikan politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah berupaya sedemikian rupa untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat Kabupaten Pandeglang. Dalam pelaksanaannya Badan ini menggunakan metode tatap muka langsung dalam memberi pendidikan politik. Pelaksanaan pendidikan politik sendiri berlangsung sebanyak 10 kali dalam setahun untuk memaksimalkan pendidikan politik tersebut tak jarang badan ini bekerja sama dengan pihak lain guna melaksanakan pendidikan politik di Kabupaten Pandeglang, adapun sasaran dari pendidikan ini adalah seluruh elemen masyarakat Kabupaten Pandeglang yang siap memilih baik pemilih pemula atau pemilih tetap.

3.2. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis mengenai Pendidikan politik oleh Badan kesatuan Bangsa dan Politik bagi masyarakat di Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten menghasilkan temuan bahwa upaya yang dilakukan Badan Kesbangpol cukup meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap politik tapi tidak meningkatkan pengetahuan secara politik secara signifikan ini

selaras dengan hasil dari penelitian Wanma (2013) bahwa upaya dari peningkatan pengetahuan politik tidak signifikan dipengaruhi oleh pendidikan politik

Penelitian ini juga menghasilkan temuan bahwa pendidikan politik membawa dampak positif terhadap partisipasi masyarakat, ini dilihat adanya peningkatan partisipasi dalam pemilihan selama proses pendidikan politik dilaksanakan. Ini sesuai dengan temuan hasil temuan penelitian Anggraeni (2022) yang mendapatkan temuan pendidikan politik menyebabkan dampak positif dalam partisipasi masyarakat.

Dalam penelitian ini juga mendapatkan hasil bahwa pendidikan politik yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pandeglang kurang menjangkau masyarakat luas yang ada di Kabupaten Pandeglang ini memerlukan kerja sama antar instansi. Ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan Julyara (2015) yang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau yang mana badan tersebut belum bekerja secara maksimal karena rendahnya akses ke masyarakat terkhusus pemuda.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pandeglang sudah melaksanakan tugas dengan baik dan berkesinambungan menggunakan metode tatap muka langsung sehingga dapat langsung bersentuhan dengan masyarakat yang ada. Sasaran yang dituju dari pendidikan politik yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah seluruh elemen masyarakat Pandeglang, adapun hambatan yang terjadi di dalam pelaksanaan pendidikan politik pada masyarakat terbagi menjadi dua faktor yaitu internal dan eksternal, secara internal kurangnya pegawai profesional dan memiliki kompetensi yang bekerja di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik secara eksternal cuaca mengganggu jalannya pendidikan politik yang sedang dilaksanakan, Luasnya Kabupaten Pandeglang, banyaknya penduduk Kabupaten Pandeglang, serta tidak meratanya infrastruktur di Kabupaten Pandeglang. Upaya yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pandeglang dalam mengatasi hambatan yang terjadi pada pelaksanaan pendidikan politik adalah dengan menggandeng instansi lainnya dalam melaksanakan pendidikan politik, seperti KPU, LSM, Ormas, atau Tokoh Masyarakat. Selain itu Badan ini juga melaksanakan pendidikan politik secara tak langsung dengan menggunakan media cetak dengan harapan dapat menjangkau masyarakat pedalaman.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian ini juga menggunakan teori lama serta kurangnya informan yang dibutuhkan.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari bahwa penelitian ini belum spesifik memecah permasalahan yang ada, diharapkan buat penelitian selanjutnya yang membahas mengenai pendidikan politik yang ada di Kabupaten Pandeglang dapat lebih mengerucut ke arah yang spesifik

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pandeglang beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta kepada Nurmilah, Dewi, Pak Dery, Bu Kholifah serta seluruh pihak yang membantu dan menukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Bungin, B. 2015. *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik*,. Jakarta: Prenadamedia group.
- Ismawan, I. 1999. *Money Politics Pengaruh Uang Dalam Pemilu*. Yogyakarta: Penerbit Media Presindo.
- Kartini, K. 1996. *Pendidikan politik sebagai bagian dari pendidikan orang dewasa*. Bandung: Mandar Maju.
- Simangunsong, F. 2017. *Metodologi Penelitian Pemerintahan : Teoritik-Legalistik-Empirik-Inovatif*. Bandung: Alfabeta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 122 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

SUMBER LAINNYA

- Anggraeni, S. B. (2022). *Pendidikan politik dan political engagement : Pengaruh pendidikan politik alumni ilmu politik Fisip Uin Syarif Hidayatullah Jakarta terhadap keterlibatannya dalam institusi politik* (thesis). UIN Syarif Hidaatullah Jakarta, Jakarta.
- Bashori, K. 2018. Pendidikan politi di era disrupsi. *Jurnal Pendidikan*, 287-310
- Julyara, A. (2015). Peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam. *Universitas Maritim Raja Ali Haji*.
- Newsdetik.com. (2019). Caleg ini curhat ke Bawaslu Banten, ngaku kalah karena politik uang. Diakses pada 25 Oktober 2022, dari <https://news.detik.com/berita/d-4522715/caleg-ini-curhat-ke-bawaslu-banten-ngaku-kalah-karena-politik-uang>
- KPU. (2021). *Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2020 Dalam Kondisi Bencana Non-Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Pandeglang: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang.
- Wanma, A. V. (2013). Pentingnya Pendidikan Politik Generasi Muda Terhadap Pelaksanaan Partisipasi Politik Di Distrik Samofa Kabupaten. *Fisip Unsrat*.